

DISUSUN
BERDASARKAN
KURIKULUM TERBARU
NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
AGAMA ISLAM

Prof. Dr. H. Boedi Abdullah

PERADABAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Sambutan :

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD BDG



Peradaban Pemikiran
Ekonomi Islam



Prof. Dr. H. Boedi Abdullah

Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam

SAMBUTAN

**Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Editor:

Dedi Syupriyadi, M.Ag.



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

KUTIPAN PASAL 72:

Ketentuan Pidana Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ISBN : 978 - 979 - 076 - 167 - 4

PERADABAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis: Prof. Dr. H. Boedi Abdullah

Penerbit: CV Pustaka Setia

Editor: Dedi Supriyadi, M.Ag.

-- Cet. 1 -- Bandung: Pustaka Setia, 2010

454 hlm.; 16 cm x 24 cm

Copy Right © 2011 PUSTAKA SETIA, Bandung

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

All right reserved

Desain Cover: Wandu K.S.

Khat Arab/Kaligrafi: Drs. Maman Abd. Djaliel, M.Ag.

Montase, Lay Out, Setting: Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan I: Maret 2011 M/Rabiul Akhir 1432 H

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588 - 5224105

Faks.: (022) 5224105

BANDUNG - 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)





Pengantar

Penulis

Puji syukur *alhamdulillah*, saya panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi. Dengan segala kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah SWT. kepada saya, akhirnya saya dapat menyelesaikan buku ini sesuai dengan rencana.

Buku ini merupakan salah satu buku dasar yang sesuai dengan silabus yang dipakai di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan seluruh UIN, PTAIN, IAIN, dan PTAIS, serta perguruan tinggi lainnya yang menetapkan pemikiran peradaban ekonomi Islam sebagai salah satu mata kuliah, terutama jurusan ekonomi Islam atau muamalah, jurusan manajemen perbankan syari'ah, dan jurusan lainnya.

Dalam buku ini saya membahas urgensi peradaban perekonomian Islam dari masa Arab pra-Islam, Nabi, Khalafaur Rasyidun, bani Umayyah, bani Abbasiyah, sampai bani Fatimiyah. Dalam buku ini dijelaskan pula perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Barat yang konvensional. Dengan perbandingan tersebut, letak keunggulan ekonomi sistem Islam akan diketahui. Prinsip perekonomian Islam berpihak pada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Islam tidak menghendaki kekayaan bertumpuk pada sekelompok orang tertentu. Islam mengajarkan agar kemitraan ekonomi dan ekonomi kemitraan dibangun di atas prinsip keadilan dan tolong-menolong antar-sesama umat Islam.



Buku ini juga membahas ajaran Islam tentang ekonomi dan ekonomi pola kapitalisme. Dalam ajaran Islam, sistem ekonomi yang harus dibangun berprinsip pada tolong-menolong, kejujuran, keadilan, persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Harta merupakan titipan Allah untuk diberdayakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua golongan. Dengan demikian, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan khusus, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban berzakat dan berinfak di jalan Allah.

Jika para pembaca ingin lebih mendalam mengetahui pemikiran peradaban ekonomi Islam, buku ini tepat untuk dijadikan sebagai literatur yang berharga dalam mata kuliah peradaban ekonomi Islam. *Selamat membaca!*

Bandung, Januari 2010 M

Penulis



Sambutan

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.

Satu lagi buku yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Manfaat buku karya Prof. Dr. H. Boedi Abdullah yang ada di hadapan para pembaca ini ada tiga hal berikut.

1. Dari segi sejarah perkembangan peradaban ekonomi Islam dapat dijadikan cermin oleh semua umat Islam bahwa ajaran Islam sangat mementingkan ekonomi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW. pun dikenal sebagai pedagang dan demikian pula istri pertama beliau, Siti Khadijah.
2. Prinsip utama dalam perkembangan ekonomi Islam adalah ketauhidan dan sikap saling merelakan, artinya seluruh harta adalah titipan Allah yang wajib diraih dan dipergunakan untuk kepentingan hidup yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, transaksi bisnis yang baik dan benar adalah yang dilakukan dengan sikap saling merelakan.
3. Peradaban ekonomi Islam telah mengubah pandangan mendasar tentang bahaya praktik riba yang diterapkan pada bentuk-bentuk perdagangan modern dan konvensional, termasuk dalam sektor perbankan. Ajaran dan praktik bisnis dalam Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan mengembangkan prinsip sedekah yang nilainya berlipat ganda di sisi Allah, dan sebagai penerapan prinsip bisnis dengan manusia dan Sang Pencipta. Dengan demikian, bisnis pola Islam dapat menggapai pahala duniawi dan ukhrawi.



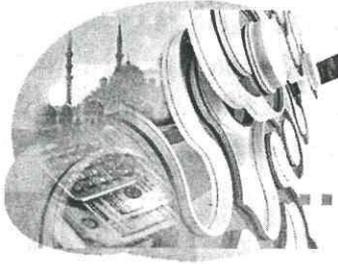
Tiga hal mendasar tersebut dapat dibaca secara lebih komprehensif dalam buku ini, di samping rekaman peristiwa perekonomian dari masa Rasulullah SAW. sampai kerajaan Islam. Buku ini memberikan sumbangan yang berarti untuk menambah khazanah keilmuan islami di bidang perkembangan ekonomi Islam dari zaman ke zaman.

Mudah-mudahan, buku ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dengan membaca buku ini berarti kita memiliki hasrat yang tinggi untuk menambah wawasan pengetahuan dan kekayaan literer dalam bidang ekonomi Islam.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si.

Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung





Daftar

Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	15
A. Memahami Urgensi Peradaban Perekonomian Islam	15
1. Demi Pelurusan Sejarah	15
2. Ibrah dan Reformulasi Fakta	18
B. Deskripsi Perniagaan pada Masa Arab Pra-Islam	22
1. Tatahan Sosial-Budaya Arab Pra-Islam	22
2. Deskripsi Kehidupan Ekonomi Bangsa Arab	30
3. Pengaruh Sejarah Islam terhadap Pembentukan Sistem Ekonomi Islami	34
BAB 2 PERADABAN PEREKONOMIAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.	39
A. Hijrah sebagai Awal Membangun Peradaban Baru	39
1. Legalisasi Hijrah	39
2. Hijrah dan Kebangkitan Islam	40
B. Jejak Rekam Perekonomian Islam pada Masa Muhammad SAW.	42
C. Pengembangan Sistem Ekonomi atas Petunjuk Al-Quran	44
D. Pembentukan Sosial-Politik-Ekonomi Madinah	54
1. Sosial Budaya Madinah	54
2. Madinah Sebelum Peristiwa Hijarah	55
3. Sosio-Ekonomi Madinah	60
4. Pasar pada Masa Rasulullah SAW.	70



BAB 3 PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN (11– 60 H/632 – 666 M)	75
A. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq	75
B. Khalifah Umar ibn Al-Khaththab	82
C. Khalifah Utsman bin Affan	101
D. Khalifah Ali bin Abi Thalib	106
BAB 4 PERADABAN PEREKONOMIAN PADA MASA BANI UMAYYAH (41 H – 132 H/661 – 750 M)	111
A. Wilayah Pemerintahan Bani Umayyah	111
B. Sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan	120
C. Kebijakan Umum pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah	121
D. Kegiatan Perekonomian pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah	124
BAB 5 PERADABAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABBASIYAH (750 – 857 M/132 – 232 H)	127
A. Pendirian Bani Abbasiyah	127
B. Kebijakan Administrasi Keuangan Negara Abbasiyah ...	129
C. Perekonomian dan Perdagangan pada Masa Abbasiyah .	136
BAB 6 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI PARA FUQAHA PADA MASA BANI ABBASIYAH DAN MASA MODERN	143
A. Terminologi Pemikiran Ekonomi Islam	143
B. Fase-fase Pemikiran Ekonomi Islam	144
C. Para Pemikir Ekonomi Islam	146
1. Abu Hanifah (80 – 150 H/699 – 767 M)	146
a. Biografi	146
b. Pemikiran Ekonomi	149
2. Abu Yusuf	150
a. Biografi	150
b. Pemikiran Ekonomi	152

3.	Asy-Syaibani	166
	a. Riwayat Hidup	166
	b. Pemikiran Ekonomi	167
4.	Abu Ubaid (150 – 224 H)	173
	a. Riwayat Hidup	173
	b. Pemikiran Ekonomi	174
	c. Reformasi Distribusi Zakat	180
	d. Uang antara Fungsi dan Alat	181
5.	Yahya bin Umar	182
	a. Riwayat Hidup	182
	b. Pemikiran Ekonomi	184
6.	Ibn Miskawaih	189
	a. Biografi	189
	b. Karya Miskawaih	191
	c. Pemikiran Ekonomi	192
7.	Al-Mawardi	192
	a. Riwayat Hidup	192
	b. Karya dan Pemikiran Ekonomi	193
8.	Al-Ghazali	201
	a. Biografi Al-Ghazali	201
	b. Karya-karya Al-Ghazali	208
	c. Kondisi Sosial dan Politik pada Masa Al-Ghazali	211
	d. Pemikiran Ekonomi	215
	e. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar	219
	f. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba	221
	g. Etika Perilaku Pasar	223
	h. Aktivitas Produksi	224
	i. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar	224
	j. Hierarki Produksi	224
	k. Tahapan produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitannya	225
	l. Barter dan Evolusi Uang	227
	m. Problema Barter dan Kebutuhan dan Kebutuhan terhadap Uang	228



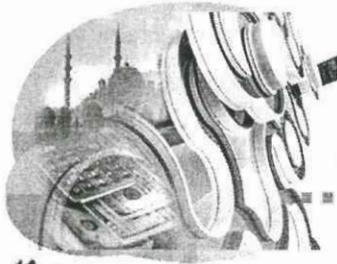
n.	Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbun ..	229
o.	Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang	230
p.	Larangan Riba	231
q.	Peranan Negara dan Keuangan Publik	233
r.	Kemajuan Ekonomi melalui Keadilan, Keadamaian, dan Stabilitas	233
s.	Keuangan Publik	235
t.	Penggunaan Uang pada Zaman Rasulullah SAW dan Khilafah	239
u.	Evolusi Uang dan Fungsi Uang	242
9.	Ibnu Taimiyah (661 – 728 H/1263 – 1328 M)	250
a.	Riwayat Hidup	250
b.	Pemikiran Ekonomi	251
10.	Asy-Syatibi (790 H/1388 M) dan Fuqaha Lainnya ..	271
a.	Riwayat Hidup	271
b.	Pemikiran Ekonomi	276
D.	Pemikiran Fuqaha tentang Maqashid sebagai Dasar Kebutuhan Ekonomi Manusia	279
1.	Ibnu Khaldun (732 – 808 H/1332 – 1406 M)	283
a.	Riwayat Hidup	283
b.	Karya-karya	285
c.	Pemikiran Ekonomi	285
2.	Al-Maqrizi	302
a.	Riwayat Hidup dan Karyanya	302
b.	Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi	304
3.	Nasiruddin Thusi (w. 485 H/1093 M)	313
4.	Shah Waliullah (1114-1176 H/1703 – 1762 M)	316
a.	Biografi	316
b.	Pemikiran Ekonomi	318
5.	Muhammad Iqbal	319
a.	Biografi	319
b.	Pemikiran Ekonomi	322

BAB 7 JEJAK REKAM PEMIKIRAN EKONOMI PADA MASA KHILAFAH KERAJAAN USMANI	325
A. Pendahuluan	325
B. Kontribusi Pemikiran Cendekiawan Muslim dalam Ekonomi Kontemporer	331



1. Ekonomi Moneter	331
2. Laissez-faire: Mazhab Pasar Bebas	332
3. Intervensi Pemerintah	336
4. Konsep Harga dalam Islam	338
5. Pembagian Kerja (<i>Division of Labour</i>)	342
BAB 8 PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAMI DENGAN PEMIKIRAN EKONOMI KONVENSIONAL	345
A. Pendahuluan	345
B. Islam dan Kapitalisme	345
C. Islam dan Sosialisme	353
D. Analisis Perbandingan Ketiga Sistem	360
E. Islam dan Doktrin <i>Welfare-State</i>	363
F. Islam dan Marisme	367
G. Melacak dan Merunut Kembali Sejarah Perekonomian Islam	384
LAMPIRAN-LAMPIRAN	391
DAFTAR PUSTAKA	449





Pendahuluan

Bab 1

A. Memahami Urgensi Peradaban Perekonomian Islam

1. Demi Pelurusan Sejarah

Apa yang dipahami dari sejarah peradaban ekonomi Islam, hakikatnya adalah memahami sejarah perjalanan panjang Islam yang titik puncaknya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW. Hanya Muhammad SAW. sebagai tolok ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Adam Smith, tokoh ekonomi Barat dalam bukunya *The Wealth of Nation*, menyatakan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi bangsa Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya meskipun tidak dimungkiri terdapat sejarah panjang sebelum kedatangan Islam Nabi Muhammad SAW. Betul, pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti sejarah nyata terhadap sejarah ekonomi Islam, meskipun porsinya kecil. Akan tetapi, perjalanan Islam tidak akan terlepas dari figur Muhammad SAW. dan para penerusnya, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidun, tabi'in, dan para pemikir ekonomi, baik pada masa pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Dengan demikian, memahami peradaban ekonomi Islam, pada dasarnya memahami sejarah. Yang paling pokok dari sejarah adalah meluruskan sejarah secara tepat dan akurat.

Begitu pula dengan sejarah perekonomian Islam yang diindikasikan terdapat pembelokan sejarah secara nyata apabila dilihat dari berbagai buku

sejarah Islam karya orang-orang Barat/Eropa atau penjelasan faktual yang keluar dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Atas kenyataan ini, penulis mencoba untuk menguraikan secara singkat mata rantai sejarah ekonomi Islam sehingga tidak terjadi distorsi sejarah secara sepihak.

Sangat tidak *fair* dan tidak proporsional penjelasan dari para guru, ekonomi mulai tingkat SMP/SMA dan berbagai fakultas ekonomi atau perguruan tinggi di bidang ekonomi bahwa ilmu ekonomi berawal dari zaman Yunani, kemudian loncat ke Adam Smith, seperti yang terdapat di dalam tulisan Schumpeter *History of Economics Analysis*. Satu-satunya ilmuwan muslim yang disebutnya secara sepintas hanyalah Ibnu Khaldun di dalam konpendium dari Schumpeter.¹ Bahkan, dalam buku ekonomi Paul. A. Samuelson, terdapat diagram ilmu ekonomi, yang puncak tertinggi dari ilmu ekonomi adalah “bible”. Keanehan buku itu adalah adanya suatu loncatan jauh yang disebut dengan *The Greats Gaps*. Loncatan jauh tersebut adalah bahwa sejarah yang dimulai pada zaman filsuf Yunani (Aristoteles, Plato, dan lain-lain) langsung menuju nama St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) dan St. Albeertus Magnus (1206-1280 M). Padahal, jarak mereka ratusan tahun. Keanehan inilah yang mereka sebut dengan masa *The Dark Age*— masa kegelapan bangsa-bangsa Eropa. Mereka menganggap seluruh dunia ini masih dalam masa kegelapan. Padahal, masa kegelapan Eropa pada waktu itu adalah masa keemasan khilafah Islamiah. Pada saat itu Timur Tengah— tepatnya Turki Utsmani— adalah jalur utama perdagangan antara Timur dan Barat. Akan tetapi, mereka mencoba menghilangkan pengaruh umat Islam dalam kanvas perekonomian dunia. Artinya, ada berapa abad kegemilangan perekonomian yang dibangun oleh umat Islam pada zaman dulu yang ingin mereka sembunyikan dari sejarah.²

Salah satu fakta lain yang perlu diluruskan dalam sejarah ekonomi Islam adanya pencatutan teori misalnya teori *Invisible Hands* yang berasal dari Nabi

1 Lihat tulisan Agustianto, “Meracik Pemikiran Ekonomi Islam” diakses dari <http://agustianto.niriah.com/2008/04/28>.

2 Dalam analisis Arif Hoetoro, terdapat motivasi balas dendam dan sifat bias *eurocentric* terhadap Islam akibat Perang Salib sehingga para penulis Barat tidak memasukkan pemikiran ekonomi Islam ke dalam sejarah ekonomi dunia. Lahirlah *missing link* dalam sejarah pemikiran ekonomi, lihat *Ekonomi Islam*, (BPFE Unibraw), 2007, hlm. 39.

SAW. dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadis Nabi SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah SAW. dengan berkata, “Wahai Rasulullah! Hendaklah engkau menentukan harga.” Kemudian, Rasulullah SAW. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسْعِرُ وَإِنِّي
أَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَلِّبُنِي
بِمُظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدِرْهَمٍ وَلَا مَالٍ .

رواه الدارمي

Artinya:

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

(H.R. Ad-Darimi)

Dari hadis ini terlihat jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand*³ atau mekanisme pasar daripada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga.

Pelurusan sejarah ekonomi Islam lain adalah ketiadaan penyebutan tokoh-tokoh ekonomi Islam, yang penting sebagai mata rantai yang perlu diluruskan. Secara historis, hampir kurang lebih 7-8 abad lamanya, sepanjang zaman itu bermunculan ekonom muslim, seperti pada *fase pertama*, Zaid bin Ali (80-120/699-738 M), Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M), Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam (150-224 H/838 M), Yahya bin Umar (213-289 H), Harits bin Asad Al-Nuhasibi (243 H/858 M), dan

3 Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah)?

lain-lain. *Fase kedua*, Asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (732 - 808 H/1332-1406 M), Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1442 M). *Fase ketiga*, Shah Wali Allah (w. 1176 H/1762 M), Muhammad Iqbal (w. 1357 H/1938 M), Abu A'la Al-Maududi. *Fase keempat*, M. Umar Chapra, M. Najetullah Siddiqi, Muhammad Baqir As-Sadr. Muhammad Abdul Mannan, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Kahf, Sayyid Mahmud Taleghani, dan lain-lain. Mereka, terutama yang hidup pada fase pertama dan kedua menjadi rujukan para pemikir ekonom Barat, bahkan banyak buku atau pemikiran mereka dibajak habis-habisan. Salah satu contoh buku *The Wealth of Nation*-nya Adam Smith diindikasikan adalah bajakan dari bukunya Abu Ubaid dengan judul *Al-Anwal* yang memiliki arti yang sama dengan buku Adam Smith.⁴

2. *Ibrah dan Reformulasi Fakta*

Satu hal lagi dalam memahami sejarah peradaban ekonomi Islam adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan utama ekonomi Islam. Al-Quran dipersonifikasikan melalui figur Muhammad SAW., satu-satunya rujukan utama pelaku ekonomi bagi para sahabat dan penerusnya dalam semua aspek kehidupan. Artinya, kita dituntut secara objektif untuk memahami sirah nabawiyah sebagai subjek utama ekonomi Islam yang dijadikan rujukan para pemikir dan muslim. Sirah nabawiyah dapat menjadi cermin sehingga kita mampu menarik pelajaran serta menggali secara metodologis aspek ekonomi, baik pada diri Rasulullah atau yang tertulis dalam Al-Quran.

Sirah nabawiyah merupakan seri perjalanan hidup seorang manusia pilihan yang menjadi parameter hakiki dalam membangun potensi umat sehingga mempelajarinya bukan sekadar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu, melainkan untuk menarik pelajaran dan menemukan rumusan kesuksesan generasi masa lalu untuk diulang di dalam kehidupan masa kini. Melalui pemahaman sirah nabawiyah yang tepat, setiap muslim akan mendapatkan gambaran yang utuh dan paripurna tentang hakikat Islam dan semangatnya terbangun untuk merealisasikan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupannya saat ini. Apalagi sasaran utama dari kajian

4 Arif Hoetoro, *ibid.*, hlm. 64-66.

sirah nabawiyah adalah mengembalikan semangat juang untuk merebut kembali kejayaan yang pernah dimiliki umat Islam.

Secara umum, kepentingan kita mengkaji sirah nabawiyah, adalah sebagai berikut.

1. Memahami pribadi Rasulullah SAW. sebagai utusan Allah (*fahmu syakhsyah ar-rasul*). Dengan mengkaji sirah, kita dapat memahami celah kehidupan Rasulullah SAW. sebagai individu maupun sebagai utusan Allah SWT. sehingga kita tidak keliru mengenal pribadinya sebagaimana kaum orientalis memandang pribadi Nabi Muhammad SWT. sebagai pribadi manusia biasa.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ بَأَن
لَّهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا. ﴿الْأَحْزَاب: ٤٥-٤٧﴾

Artinya:

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.”

(Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 45-47)

2. Mengetahui contoh teladan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Contoh teladan merupakan sesuatu yang penting dalam hidup ini sebagai model ideal. Model hidup tersebut akan mudah kita dapati dalam kajian sirah nabawiyah yang menguraikan kepribadian Rasulullah SAW. yang penuh pesona dalam semua sisi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ



Peradaban Perekonomian pada Masa Nabi Muhammad SAW.

Bab 2

A. Hijrah sebagai Awal Membangun Peradaban Baru

1. Legalisasi Hijrah

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. yang dilegalkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab, sebagai awal tahun baru dalam kalender Islam dipopulerkan sebagai tahun Hijriah yang penetapannya dilakukan sejak Rasul hijrah pada tahun 622 Masehi. Kebijakan khalifah itu merupakan momentum sebagai awal tahun Islam. Di antara alasan penetapan tersebut adalah hijrah merupakan pemisahan periode Mekah dan Madinah. Secara historis, umat Islam pada periode awal di Mekah mengalami pengebirian dan penyiksaan dari kaum kafir atas prakarsa Abu Jahal dan Abu Lahab. Bagi Nabi dan sahabatnya, periode Mekah prahijrah merupakan ujian terberat dari langkah awal mendakwahkan Islam sebagai ajaran yang benar, yang banyak ditantang kaum kafir Jahiliyah.

Untuk melepaskan dari hegemoni kaum Jahiliyah Mekah, Nabi memutuskan untuk hijrah atas petunjuk Allah dengan meninggalkan kampung kelahiran, harta, dan keluarga yang dicintainya dengan berjalan kaki tidak kurang dari 500 km menuju Madinah. Pasca hijrahnya Nabi bersama sahabat ke Madinah merupakan awal pencerahan dan perubahan nasib umat Islam. Sebab, apabila di Mekah, umat Islam yang masih minoritas ditindas dan

dimusuhi, di Madinah, umat Islam justru mendapatkan perlakuan cukup baik dari kaum Anshar. Dalam hal ini, peristiwa hijrah Nabi dimaknai sebagai bagian terpenting dalam sejarah Islam, yakni tonggak awal kebangkitan Islam.

Di Madinah, bersama-sama dengan sahabatnya, Nabi mulai membangun peradaban Islam yang selama ini banyak diadopsi sebagai masyarakat madani, yakni sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang dibangun dan diwujudkan sesuai internalisasi ajaran Islam yang diprakarsai Nabi. Selain itu, hijrah Nabi juga merupakan pemisah antara periode Mekah yang terkungkung dari kaum Jahiliyah beralih ke Madinah yang justru menjadi negeri pembebasan, sekaligus mencerminkan heterogenitas umat, baik muslim maupun non-muslim hidup selaras dengan merujuk pada piagam Madinah.

Momentum hijrah menjadi awal kebangkitan peradaban Islam yang menyejarah. Nabi menancapkan pilar peradaban Islam di Madinah sebagai tonggak perjuangan umat paling strategis. Dalam konteks lebih luas, perintah hijrah bukan hanya secara seremonial bagi nabi, tetapi menjadi medium pembelajaran bagi umat Islam untuk melakukan perubahan, baik perubahan fisik maupun nonfisik, seperti perubahan mental dan perilaku yang lebih baik dan terpuji.

Usaha-usaha untuk melakukan perbaikan, terutama untuk memperbaiki kualitas individual atau kualitas kolektif anak bangsa. Keterbelakangan umat manusia harus disikapi lebih arif dengan melakukan hijrah individual dengan membenahi kepribadian menuju perbaikan moral keluarga dan masyarakat-bangsa.

2. Hijrah dan Kebangkitan Islam

Setiap tahun, umat Islam menyambut tahun Hijriah, tetapi dengan memaknai hijrah secara lebih luas yakni, hijrah nilai, misalnya hijrah dari nilai budaya yang buruk menuju nilai budaya yang Islami. Dalam pengertian ini, *ghirah* atau semangat hijrah yang patut diimplementasikan bukan lagi dalam pengertian fisik, tetapi hijrah secara kontekstual dengan meninggalkan segala peradaban atau nilai-nilai yang tidak baik dan tidak urgen menuju peradaban lebih baik yang diridai Allah dan dapat diterima umat manusia pada umumnya. Menyingkapi kondisi sekarang, perilaku menyimpang yang dilakukan, seperti

perilaku masyarakat biasa dengan pelbagai kejahatan dan kriminalitas yang telah mencerminkan kehidupan penuh kekerasan, sepatutnya ditinggalkan dengan berhijrah pada kehidupan yang lebih baik.

Demikian pula, halnya dengan pola kehidupan pejabat yang banyak melakukan penyimpangan atas amanah rakyat. Seperti melakukan korupsi atau perbuatan munkar lainnya sebagai fenomena fasad berupa perusakan di muka bumi tanpa kontrol maka idealnya mereka berhijrah dari perilaku tersebut menuju ke jalan yang baik dengan mengembang amanah dan kepercayaan rakyat dengan penuh tanggung jawab. Artinya, saatnya untuk melakukan hijrah menuju pada internalisasi nilai-nilai Islam. Ravitalisasi makna hijrah yang dikontekstualkan dalam kehidupan sekarang menjadi keniscayaan dengan mengubah sistem seperti yang dilakukan Nabi pasca-hijrah dari Mekah ke Madinah, yakni membangun peradaban masyarakat madani dengan sistem yang tertib, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan membangun sistem sosial berupa mempersamakan orang-orang yang beragam suku dan agama dalam masyarakat Madinah tersebut.

Proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah menyiratkan multiinterpretasi yang sepatutnya diaktualisasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian. Penulis mengurai makna filosofis dan aplikasi hijrah tersebut dalam beberapa pemahaman berikut.

Pertama, hijrah sepatutnya dimaknai sebagai ikhtiar untuk hijrah dari keterbelakangan menuju kondisi lebih maju dan dinamis. Keterbelakangan dalam konten tersebut melingkupi keterbelakangan secara individual atau keterbatasan SDM, dan keterbelakangan kolektif. Dalam hal ini, keterbelakangan negara-bangsa dalam menyejahterakan masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.

Kedua, hijrah secara universal dapat ditafsirkan sebagai proses perubahan atau berhijrah dari sistem otoriter, era keterkungkungan menuju era keterbukaan dan pembebasan. Melepaskan diri dari hegemoni tersebut menuju perubahan yang memberi ruang untuk berekspresi dalam meraih kebebasan dan pembebasan, termasuk keluar dari kungkungan rezim yang menindas.

Ketiga, dimensi hijrah dari kejahiliahn menuju pencerahan juga menjadi makna dari hijrah. Oleh karena itu, melakukan rekonstruksi pendidikan

dengan sistem yang lebih baik dan efisien sebagai upaya melahirkan sumber daya yang potensial pada masa mendatang demi kemaslahatan bangsa, menjadi keniscayaan.

Demikian beberapa interpretasi dan makna hijrah sebagai revitalisasi dengan konteks kekinian. Sejatinya, seorang muslim menjadikan bulan Muharram yang setiap tahunnya diperingati sebagai upaya untuk membangun kesalehan individual dan sosialnya, sekaligus mengimplementasikan diri sebagai bagian Islam yang *rahmatan lil alamin*, yang mengurai kedamaian dalam seluruh dimensi dan lini kehidupan duniawinya sebagai bekal menuju perjalanan akhirnya yang abadi.¹

B. Jejak Rekam Perekonomian Islam pada Masa Muhammad SAW.

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW. dalam meraih kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu adalah kemampuannya dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Sebagian dari nilai dan budaya Arab pra-Islam, untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh umat Muhammad ke dalam tatanan moral Islam.²

Secara simplistis, kelahiran Muhammad SAW. ke muka bumi pada hakikatnya adalah kelahiran sebuah peradaban baru yang penuh pencerahan. Menurut Will Durant dalam *The Story of Civilitation*, jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, Muhammad adalah seorang raksasa sejarah. Beliau berjuang meningkatkan taraf hidup rohaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena keganasan dan kegersangan gurun dengan pedoman Islam.³

1 Firdaus Muhammad; <http://www.dukonbesar.com>

2 Charles J. Adams, "Islam" dalam *A Reader's Guide to the Great Religions* (Editor : Charles J. Adams), New York: The Free Press, 1977, hlm. 411. Lihat pula Ignas Goldziher, *Muslim Studies*, (London, Geoge Allen dan Unwin, 1967-71). Kemampuan yang dimiliki adalah cara menyosialisasikan Islam yang tidak mengklaim bahwa Islam itu adalah agama baru. Kata *Islam* sudah dikenal oleh bangsa Arab karena ia adalah bahasa Arab. Bahkan di lain kesempatan, Nabi SAW. menyatakan bahwa usia agama Islam adalah setua bukit-bukit yang ada di padang pasir, lihat Asaf A.A. Fyzee, *op.cit.*, hlm. 12.

3 <http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahooogroups.com/msg29053.html>

Tentu saja, pedoman yang digunakan oleh Nabi SAW. dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah Al-Quran. Sekalipun demikian, sebagaimana diketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur (*tadriji*) dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu yang sudah diturunkan itulah, Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi, ada kalanya timbul persoalan yang cara penyelesaiannya belum disebut oleh wahyu yang sudah diterima oleh Nabi. Dalam hal ini, Nabi berijtihad.⁴

Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Dalam arti lain, secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, sedangkan Tuhan membuat hukum secara tidak langsung. Hal ini karena tugas Nabi adalah menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Setelah Nabi wafat, para sahabat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan Nabi. Oleh karena itu, sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk masa-masa selanjutnya ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi.⁵

Masa Nabi ini terbagi dua periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah⁶ berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak wahyu pertama hingga Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam periode ini, Nabi telah mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat Arab

4 Ulama ikhtilaf tentang ijtihad Nabi Muhammad SAW. terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash* dari Allah. Sebagian ulama Asy'ariah dan kebanyakan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak boleh melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash*, yang berhubungan dengan amaliah tentang halal dan haram. Adapun ulama ushul, di antaranya Abu Yusuf Al-Hanafi dan Asy-Syafi'i membolehkannya (Muhammad Salam Madkur, 1974: 351). Sebagian shahabat Asy-Syafi'i, Al-Qadhi 'Abd Al-Jabar, dan Abu Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW. melakukan ijtihad dalam berperang, bukan dalam bidang hukum (Muhammad Salam Madkur, 1974: 352). Menurut sebagian ulama, Nabi SAW. tidak berijtihad sebab perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya adalah As-Sunnah—sumber atau dalil hukum Islam kedua, juga berdasarkan pada firman Allah, *wa mā yanthiq 'an al-hawā in huwa illa wahy yūhā* (Lihat Q.S. An-Najm [53]: 3-4) yang artinya: "dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya."

5 Harun Nasution, *Islam...*, hlm. 10.

6 Ciri-ciri masyarakat Islam pada fase Mekah adalah (a) jumlah mereka masih sangat sedikit; (b) karena kecil, mereka masih sangat lemah dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh para penentang Islam (Sya'ban Muhammad Isma'il, 1985: 93; dan 'Umar Sulaiman Al-'Asyqar, 1991: 41); dan (c) karena lemah, mereka dikucilkan oleh masyarakat penentang Islam, antara lain pemblokadean kegiatan ekonominya.



Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin (11–60 H/632–666 M)

Bab 3

A. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

1. Kelahiran Abu Bakar

Nama lengkap Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah bin Usman bin Amr bin Masud bin Taim bin Murrah bin Kilab bin Luai bin Ghalib bin Fihir At-Tamimi Al-Qurasyi. Ini berarti silsilahnya dengan Nabi bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 M. Ia dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Usman (Abu Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Saad bin Laym bin Mun'ah bin Ka'ab bin Lu'ay, berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Al-Khair Salmah binti Sahr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah. Garis keturunannya bertemu pada neneknya, yaitu Ka'ab bin Sa'ad.¹

Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan. Baginya, tidaklah sulit untuk memercayai ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. karena sejak kecil, ia telah mengenal keagungan Muhammad. Setelah masuk Islam, ia tidak segan untuk menumpahkan segenap jiwa dan harta bendanya untuk Islam. Tercatat dalam

¹ Lihat M. Rida, *Abu Bakar Ash-Shiddiq Awalu Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983, hlm. 7-8.



sejarah ia pernah membela Nabi tatkala Nabi disakiti oleh suku Quraisy, menemani Rasul hijrah, membantu kaum yang lemah dan memerdekakannya seperti terhadap Bilal, setia dalam setiap peperangan, dan lain-lain.²

Pengorbanan Abu Bakar terhadap Islam tidak dapat diragukan. Ia juga pernah ditunjuk Rasul sebagai penggantinya untuk mengimami shalat ketika Nabi sakit. Nabi SAW. pun wafat, tak lama setelah kejadian tersebut. Tanpa ada pesan mengenai penggantinya pada kemudian hari. Itulah sebabnya, pada saat jenazah Nabi belum dimakamkan, di antara umat Islam ada yang mengusulkan untuk cepat-cepat memikirkan pengganti Nabi. Itulah perselisihan pertama terjadi pasca-Nabi wafat. Perselisihan tersebut berlanjut pada perselisihan kedua di Saqifah bani Sa'idah,³ pada saat kaum Anshar menuntut diadakannya pemilihan khalifah. Sikap yang ditunjukkan kaum Anshar menunjukkan bahwa kaum Anshar lebih memiliki rasa kepedulian dalam hal berpolitik dibandingkan dengan kaum Muhajirin. Setidaknya ada persaingan di antara kaum Anshar, Muhajirin, dan bani Hasyim.⁴

Aturan-aturan yang jelas tentang pengganti Nabi tidak ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandat yang diterima Abu Bakar menjelang wafatnya Nabi untuk menjadi badal imam shalat. Sesuatu yang masih merupakan tanda tanya terhadap mandat tersebut. Adakah suatu pertanda Nabi menunjuk Abu Bakar atau tidak?⁵

Dalam pertemuan tersebut, sebelum kaum Muhajirin datang, golongan Khajraz telah sepakat mencalonkan Sa'ad bin Ubadah,⁶ sebagai pengganti Rasul. Akan tetapi, suku Aus belum menjawab atas pencalonan tersebut, kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka dan pada akhirnya Sa'ad bin Ubadah tidak menginginkan adanya perpecahan dengan mengatakan ini merupakan awal dari perpecahan. Melihat situasi yang panas tersebut, Abu Ubaidah mengajak kaum Anshar untuk bersikap dingin dan toleran, kemudian

2 Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid I*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 38.

3 Sebuah tempat yang biasa digunakan oleh kaum Anshar untuk membahas suatu masalah, tempatnya di Madinah. Sebagaimana pula *Dar An-Nadwah* sebuah balai pertemuan Quraisy di Mekah. Lihat juga Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1994, hlm. 102.

4 Syed Mahmudunnasir, *op.cit.*, hlm. 80.

5 S. Khuda Bakhsh, *Politik Islam*, Delhi: Idarah Al-Adabiy, t.t., hlm. 11.

6 Adalah satu-satunya pemimpin yang secara tegas menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, akhirnya ia meninggalkan Madinah menuju Syiria sampai akhir hayatnya.



Basyir bin Sa'ad Abi An-Nu'man bin Basyir berpidato dengan mengatakan agar tidak memperpanjang masalah ini.⁷ Dalam keadaan yang sudah dingin ini, Abu Bakar berpidato, "Ini Umar dan Abu Ubaidah, siapa yang kamu kehendaki di antara mereka berdua maka baiatlah."

Baik Umar maupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas ucapan Abu Bakar tersebut. Keduanya berpendapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat sebagai pengganti Rasulullah SAW. dengan mempertimbangkan berbagai alasan, di antaranya penunjukan Abu Bakar sebagai pengganti Rasul dalam imam shalat dan ini membuat Abu Bakar lebih berhak. Sebelum keduanya membaiat Abu Bakar, Basyir bin Sa'ad mendahuluinya, kemudian diikuti Umar dan Abu Ubaidah dan secara serentak para sahabat yang hadir pun membaiat Abu Bakar r.a.⁸

Dari paparan di atas, terlihat bahwa Abu Bakar dipilih secara aklamasi, walaupun ada tokoh lain yang tidak ikut membaiatnya, misalnya Ali bin Abi Thalib, Abbas, Thalbah, dan Zubair yang menolak dengan hormat.⁹ Mereka masih mempermasalahkan pengangkatan Abu Bakar. Keadaan penolakan tersebut akhirnya baru muncul setelah pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kelompok lain yang tidak menyetujuinya ialah dari Anshar Sa'ad bin Ubadah meskipun pada akhirnya tenggelam dalam sejarah.

Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap, isi pidatonya sebagai berikut:

"Wahai manusia! Sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya, Insya Allah. Janganlah salah

7 Rida, *ibid.*, hlm. 30. Thabari, *ibid.*, hlm. 40.

8 Rida, *ibid.*, hlm. 31. Thabari, *ibid.*, hlm. 41-42.

9 Hasan Ibrahim Hasan, *Islamic and History Culture from 632-1968*, terjemah D. Humam Cet. I, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989, hlm. 32.

seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah shalat, semoga Allah merahmati kamu."¹⁰

Ucapan pertama ketika dibaiat¹¹ ini menunjukkan garis besar politik dan kebijaksanaan Abu Bakar r.a. dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat prinsip kebebasan berpendapat, menuntut ketaatan rakyat, mewujudkan keadilan dan mendorong masyarakat berjihad serta shalat sebagai intisari ketakwaannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, baik kebijaksanaan dalam kenegaraan maupun pengurusan terhadap agama.

2. Tipologi Kebijakan Pemerintahan Abu Bakar

a. Kebijakan Pengurusan terhadap Agama

Pada awal pemerintahannya, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam yang menentang kepemimpinannya. Di antara perbuatan makar tersebut ialah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah.¹²

b. Kebijakan Kenegaraan

Di antara kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan, diuraikan Pulungan,¹³ sebagai berikut.

a. Bidang eksekutif

Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah ataupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib,

10 Abi Al-Wahid An-Najjar, *Al-Khulafā Ar-Rāsyidin*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990 hlm. 35; lihat pula Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 107-108.

11 Isi pidato kenegaraan pertama Abu Bakar lihat Abd Al-Walud An-Najjar, *Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1990, hlm. 35.

12 Ahmad Amin, *op. cit.*, hlm. 84-85. Rida, *op.cit.*, hlm. 52- An-Najjar, *op. cit.*, hlm. 98.

13 J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm. 112-113.

Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi, setiap provinsi dipimpin oleh amir.

b. *Bidang pertahanan dan keamanan*

Dengan mengorganisasi pasukan-pasukan yang ada guna mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Dari pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam atau di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin 'Ash, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain.

c. *Bidang yudikatif*

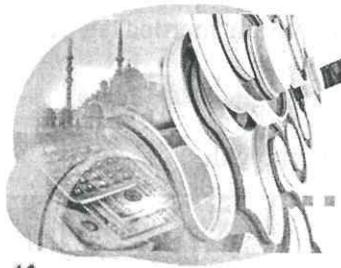
Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khaththab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Hal ini didorong atas kemampuan dan sifat Umar, dan masyarakat pada waktu itu dikenal 'alim.

3. Kebijakan Ekonomi dan Faktor Keberhasilan Khalifah Abu Bakar

a. *Pendirian Baitul Mal*

Faktor keberhasilan Abu Bakar dalam membangun pranata sosial di bidang ekonomi tidak lepas dari faktor politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak pula lepas dari sikap keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam umumnya, berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat.

Adapun tugas-tugas eksekutif, ia delegasikan kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah, ia mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai *katib* (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, mengurus *Baitul mal*. Di bidang tugas kemiliteran, ia mengangkat panglima-panglima perang sebagai disebut di atas. Untuk tugas yudikatif, ia mengangkat Umar bin Khaththab sebagai hakim agung.



Peradaban Perekonomian pada Masa Bani Umayyah (41 H–132 H/661–750 M)

Bab 4

A. Wilayah Pemerintahan Bani Umayyah

Pasca-pemerintahan Khulafa Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan bani Umayyah, sebuah pemerintahan yang diraih dengan berbagai cara “kudeta” dan menuai kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah.

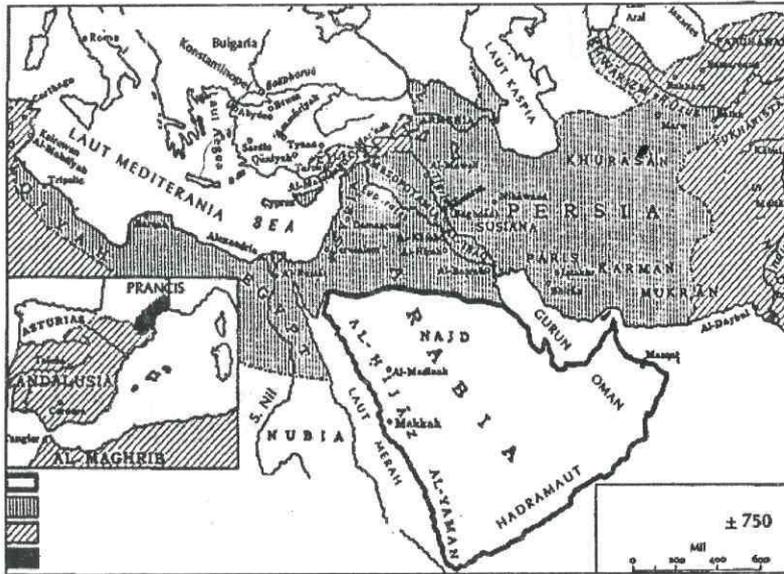
Sejarawan membagi dinasti Umayyah (Umawiyah) menjadi dua; yaitu *pertama*, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus (Syiria). Fase ini berlangsung sekitar satu abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah pada sistem *mamlakat* (kerajaan atau monarki), dan *kedua*, dinasti Umayyah di Andalusia (Liberia) yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibn Abd Al-Malik; kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti bani Abbas setelah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus.¹

Lebih dari 750 tahun, pemerintahan Islam berkibar sejak bani Umayyah sampai Abbasiyah, dua sistem pemerintahan yang belum pernah ada

¹ Siti Maryam, dkk. (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2003, hlm. 79; lihat pula Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 95.

tandingannya di dunia mana pun sampai sekarang dan merupakan suatu masa yang panjang dan luas.

Peta Kekuasaan Wilayah Bani Umayyah



Sumber: Philip K. Hitti, *History of The Arabs*

Perintisan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membaiah Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian (*tahkim*) dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali r.a. Jabatan khalifah—setelah Ali r.a. wafat—dipegang oleh putranya, Hasan ibn Ali selama beberapa bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan ibn Ali. Isi perjanjian itu adalah penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah masa Muawiyah berakhir. Perjanjian ini dibuat pada tahun 661 M (41 H) dan tahun tersebut disebut *am jama'ah*, karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah dan Muawiyah mengubah sistem khilafah menjadi kerajaan.

Pada masa itu, umat Islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan Bizantium. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara

suksesi kepemimpinan yang ada di Persia dan Bizantium, yaitu monarki (kerajaan). Akan tetapi, gelar pemimpin pusat tidak disebut raja (*malik*). Mereka tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang diperbaharui. Pada zaman khalifah empat, khalifah (pengganti) yang dimaksudkan adalah khalifah Rasul SAW. (*khalifat Ar-Rasul*) sebagai pemimpin masyarakat; sedangkan pada zaman bani Umayyah, yang dimaksud dengan khalifah adalah khalifah Allah (*khalifat Allah*), pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah. Langkah awal dalam rangka memperlancar pengangkat Yazid sebagai penggantinya adalah menjadikan Yazid ibn Muawiyah sebagai putra mahkota (tahun 53 H).²

Pemerintahan bani Umawiyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdi Manaf. Dia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa Jahiliah. Dia dan pamannya Hasyim bin Abdu Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Setelah Islam datang, pertarungan menduduki kekuasaan ini menjelma menjadi sebuah permusuhan yang transparan dan terbuka. Bani Umayyah melakukan perlawanan terhadap Rasulullah SAW. dan dakwahnya, sedangkan bani Hasyim mendukung Rasulullah SAW. dan mengikutinya. Bani Umayyah tidak masuk Islam, kecuali setelah tidak ada jalan lain, mereka harus masuk Islam. Ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah.

1. Pola Administratif Pemerintahan Umayyah

Khalifah Muawiyah mendirikan suatu pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Situasi ketika Muawiyah menjadi penguasa mengandung banyak kesulitan. Pemerintahan imperium itu didesentralisasikan, dan kacau serta munculnya anarkisme dan ketidakdisiplinan kaum nomad yang tidak lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral menyebabkan ketidakstabilan di mana-mana dan kehilangan kesatuan. Ikatan teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang lebih dulu, tanpa dapat dihindari telah dihancurkan oleh pembunuhan Utsman, oleh perang saudara sebagai akibatnya, dan oleh pemindahan ibukota dari Madinah. Oligarki di Mekah

2 Ja'ih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 97.



dikalahkan dan dicemarkan. Yang menjadi masalah bagi Muawiyah ialah mencari suatu dasar baru bagi kepaduan imperium itu. Karena itulah, dia mengubah kedaulatan agama menjadi negara sekuler. Akan tetapi, perlu diingat bahwa unsur agama di dalam pemerintah dan pemerintahan tidak hilang sama sekali. Dia mematuhi formalitas agama dan kadang-kadang menunjukkan dirinya sebagai pejuang Islam.³

Muawiyah melaksanakan perubahan-perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahan negeri itu. Dasar pemerintahannya terdapat dalam angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Dia dapat mengandalkan pasukan orang-orang Syiria yang taat dan setia, yang tetap berdiri di sampingnya dalam keadaan paling berbahaya sekalipun. Dengan bantuan orang-orang Syiria yang setia, Muawiyah berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menurut garis-garis pemerintahan Bizantium. Dia bekerja keras bagi kelancaran sistem yang untuk pertama kali digunakannya itu.⁴

Muawiyah merupakan orang pertama di dalam Islam yang mendirikan suatu departemen pencatatan (*diwanul-kahatam*). Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin di dalam suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Sebelumnya, yang dikirimkan adalah perintah-perintah yang terbuka. Pernah terjadi khalifah memberikan 1.000 dirham kepada seseorang dari pembendaharaan provinsi. Surat yang berisi perintah itu dicegat di tengah jalan, dan jumlahnya diubah dengan angka yang lebih tinggi. Pelayanan pos (*diwanulbarid*) kabarnya telah diperkenalkan oleh Muawiyah. *Barid* (kepala pos) memberi tahu pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan cara ini, Muawiyah melaksanakan kekuasaan pemerintah pusat. Muawiyah membentuk dua sekretariat imperium (pusat) yang medianya bahasa Arab, dan sekretariat provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Persia. Sebagai seorang administrator yang berpandangan jauh, Muawiyah memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Dia mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, untuk memungut pajak, pada tiap-tiap provinsi,

3 Syed Mahmuddunnasir, *op.cit.*, hlm. 152.

4 *Ibid.*

dia mengangkat seorang pejabat khusus dengan gelar *sahibul-kharaj*. Pejabat ini tidak terikat dengan gubernur, dan dia diangkat oleh khalifah. Dalam masalah keuangan, gubernur harus menggantungkannya dirinya pada *sahibulkharaj*, dan hal ini membatasi kekuasaannya. Demikianlah Muawiyah mengembangkan suatu keadaan yang teratur dari kekacauan.⁵

Muawiyah meninggal dunia dalam pada April 680 M. Secara keseluruhan, setelah memerintah imperium Islam selama kira-kira 20 tahun, masa pemerintahan Muawiyah merupakan masa kemakmuran dan perdamaian di dalam negeri serta keberhasilan di luar negeri. Tidak sedikit keberhasilan Khalifah Muawiyah berkat jasa para pengikut yang ditempatkan di sekelilingnya, terutama Amr bin Ash, wali Mesir yang subur itu, Al-Mughirah, gubernur Al-Kufah, yang bergolak, dan Ziad bin Abih, penguasa Al-Basra.⁶

2. *Ekspansi pada Masa Umayyah*

Secara umum, penaklukan pada masa pemerintahan bani Umayyah meliputi tiga wilayah. *Pertama*, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. *Kedua*, wilayah Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik kemudian menyeberang ke Gunung Thariq hingga ke Spanyol. *Ketiga*, wilayah Timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak. Kemudian, meluas ke wilayah Turkistan di utara serta ke wilayah Sindh di bagian selatan.⁷

Ekspansi bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan, dilakukan sebagai lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Muawiyah berhasil menaklukkan Tunis, Khurasan sampai ke Sungai *Oxus* dan Afganistan sampai Kabul. Angkatan laut Muawiyah menyerang Konstantinopel (ibukota Bizantium). Ekspansi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abd Al-Malik. Ia berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, Samarkand, dan bahkan sampai ke India dengan menguasai Balukhistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malтан.

5 *Ibid.*, hlm.153.

6 *Ibid.*, hlm.154.

7 Ahmad Al-Uairy, *op.cit.*, hlm. 188.



Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Abbasiyah (750–857 M/132–232 H)

Bab 5

A. Pendirian Bani Abbasiyah

Penulis tidak dapat menggambarkan Abbasiyah secara lengkap pada pembahasan ini karena keluasan dan kehebatan Abbasiyah. Sebagai gambaran umum, menurut B.G. Stryzewki, pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi lima periode:

1. Periode pertama (132 H/750 M s/d 232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia Pertama.
2. Periode kedua (232 H/847 M s/d 334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki Pertama.
3. Periode ketiga (334 H/945 M s/d 447 H/1105 M), masa kekuasaan dinasti Buwaihi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga pengaruh Persia Kedua.
4. Periode keempat (447 H/1105 M s/d 590 H/1195 M), masa kekuasaan dinasti Saljuk yang biasa disebut dengan masa pengaruh Turki Kedua.
5. Periode kelima (590 H/1194 M s/d 656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di Baghdad.¹

¹ Bojena Gajane Stryzewska, *Tarikh Al-Islamiyah*, Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, t.t., hlm. 360; lihat pula Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 49.

Dalam tulisan Philip K. Hitti, Abbasiyah merupakan babak ketiga dalam drama besar politik Islam yang dibuka oleh Abu Al-Abbas (750 M-754 M) sebagai pelopor kerajaan. Dalam khotbah penobatannya, yang disampaikan setahun sebelumnya di Masjid Kufah, Khalifah Abbasiyah pertama itu menyebut dirinya *as-saffiuh*, penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya. Julukan itu merupakan pertanda buruk karena dinasti yang baru muncul ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebijakannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, di sisi singgasana khalifah tergelar karpet yang digunakan sebagai tempat eksekusi. As-Saffah merupakan pendiri dinasti Arab Islam ketiga –setelah Khulafa Ar-Rasyidun dan dinasti Umayyah– yang sangat besar dan berusia lama. Dari 750 M hingga 1258 M, penerus Abu Al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Orang Abbasiyah mengklaim dirinya sebagai pengusung konsep sejati kekhalifahan, yaitu gagasan negara teokrasi, yang menggantikan pemerintahan sekuler (*mulk*) dinasti Umayyah. Sebagai ciri khas keagamaan dalam istana kerajaannya, dalam berbagai kesempatan seremonial, seperti ketika dinobatkan sebagai khalifah dan pada shalat Jumat, khalifah mengenakan jubah (*burdah*) yang pernah dikenakan oleh saudara sepupunya, Nabi Muhammad SAW.² Akan tetapi, masa pemerintahannya begitu singkat. As-Saffah meninggal (754 M-775 M) karena penyakit cacar air ketika berusia 30-an.

Saudaranya yang juga penerusnya, Abu Ja'far (754 M-775 M), yang mendapat julukan Al-Manshur adalah khalifah terbesar dinasti Abbasiyah, meskipun bukan seorang muslim yang saleh. Dialah sebenarnya, bukan As-Saffah, yang benar-benar membangun dinasti baru itu. Seluruh khalifah yang berjumlah 35 orang berasal dari garis keturunannya.

Masa kejayaan Abbasiyah terletak pada khalifah setelah As-Saffah. Penulis mengutip Philip K. Hitti,³ bahwa masa keemasan (*Golden Prime*) Abbasiyah terletak kepada 10 khalifah. Hal ini berbeda dengan Badri Yatim,⁴ yang memasukkan 7 khalifah sebagai masa kejayaan Abbasiyah, Jaih Mubarak,⁵

2 Philip K. Hitti, *op.cit.*, hlm. 288.

3 *Ibid.*, hlm. 297.

4 Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 52.

5 Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 119.

memasukkan 8 khalifah sebagai masa kejayaan Abbasiyah. Begitu pula Harun Nasution, hanya 6 khalifah yang masuk kategori sebagai khalifah yang memajukan Abbasiyah.⁶

Kesepuluh khalifah tersebut: As-Saffah (750 M); Al-Manshur (754 M); Al-Mahdi (775 M); Al-Hadi (785 M); Ar-Rasyid (786 M); Al-Amin (809 M); Al-Ma'mun (813 M); Al-Mu'tashim (833 M); Al-Watsiq (842 M); dan Al-Mutawakkil (847 M).

Penjelasan ringkas masa keemasan itu bahwa dinasti Abbasiyah, seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, mencapai masa kejayaan politik dan intelektual mereka segera setelah didirikan. Kekhalifahan Baghdad yang didirikan oleh As-Saffah dan Al-Manshur mencapai masa keemasannya antara masa khalifah ketiga, Al-Mahdi dan khalifah kesembilan, Al-Watsiq, dan lebih khusus lagi pada masa Harun Ar-Rasyid dan anaknya, Al-Ma'mun. Hal tersebut karena pada masa kedua khalifah yang hebat itulah, dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik, dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Seorang penulis antologi, Ats-Tsa'alabi (w. 1038 M) menyatakan, dari para khalifah Abbasiyah, "sang pembuka" adalah Al-Manshur, "sang penengah" adalah Al-Ma'mun, dan "sang penutup" adalah Al-Mu'tadhid (892-902) adalah benar.⁷

B. Kebijakan Administrasi Keuangan Negara Abbasiyah

1. Sumber Pemasukan Negara

Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Abbasiyah, sedangkan sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Para pemungut pajak resmi mengurus pajak tanah, hewan ternak dan sejenisnya, sedangkan pungutan pajak atas barang-barang pribadi, termasuk emas dan

6 Harun Nasution, *Islam...*, Jilid I, hlm. 68-69.

7 Philip K. Hitti, *op.cit.*, hlm. 297.

perak, diserahkan pada kesadaran masing-masing individu. Semua uang yang terkumpul dari orang Islam akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan negara untuk kepentingan orang Islam sendiri, yaitu untuk orang miskin, anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci, dan para budak serta tawanan yang harus ditebus. Sumber pendapatan utama lainnya adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, pajak perlindungan dari rakyat nonmuslim (*jizyah*), pajak tanah (*kharaj*), dan pajak yang diambil dari barang dagangan nonmuslim yang masuk ke wilayah Islam. Dari semua barang wajib pajak ini, pajak tanah merupakan yang terbesar dan menjadi sumber utama pendapatan negara dari nonmuslim. Semua pemasukan ini pada masa modern disebut *fay* (lihat dan bandingkan dengan Q.S. 59: 7) dan disalurkan oleh khalifah untuk membayar tentara, memelihara masjid, jalan dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam.

Menurut Ibn Khaldun, pajak tanah tahunan yang dipungut dari Sawad (Irak bagian bawah, Babilonia kuno) dalam bentuk tunai pada masa Al-Ma'mun mencapai 27.800.000 dirham; dari Khurasan sebesar 28.000.000; dari Mesir sebesar 23.040.000; dari Syiria-Palestina sebesar 14.724.000; dan dari provinsi lainnya sebanyak 331.929.008 dirham, di luar pajak-pajak lain. Catatan Qudamah tentang aset kekayaan yang terkumpul dari pemasukan pajak Sawad adalah sebesar 130.200.000 dirham; dari Khurasan sebesar 37.000.000; dari Mesir, termasuk Iskandariyah sebesar 37-500.000; dari Syiria-Palestina, termasuk Hims, sebesar 15-860.000; dan dari seluruh wilayah kerajaan, jumlah seluruh pajak sebesar 388.291.350 dirham. Ibn Khurdadzbi menyebutkan bahwa pajak dari Sawad mencapai 78.319.340 dirham; dari Khurasan dan negara lain sebesar 44.846.000; dari Syiria-Palestina sebesar 29.850.000; dan dari seluruh wilayah kerajaan sebesar 299.265.340. Adapun tentang pengeluaran, data yang kita miliki dari berbagai sumber yang berbeda itu tidak memungkinkan kita menarik kesimpulan yang pasti. Sekalipun demikian, diriwayatkan bahwa ketika Al-Manshur meninggal, kas negara berjumlah 600 juta dirham dan 14 juta dinar. Ketika Ar-Rasyid meninggal, jumlahnya mencapai lebih dari 900 juta dirham dan ketika Al-Muktatafi meninggal (908), perbendaharaan negara meliputi permata, perabotan rumah tangga, dan perumahan senilai 100 juta dinar.

Oleh karena itu, masa Abbasiyah merupakan masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban.



2. *Anggaran Pengeluaran Negara*

Besarnya pendapatan negara seiring pula dengan pengeluaran negara yang mencakup berbagai divisi pemerintahan yang telah dibentuk pemerintahan Abbasiyah, yaitu sebagai berikut:

1. administratif pemerintahan dengan biro-bironya;
2. sistem organisasi militer;
3. administrasi wilayah pemerintahan;
4. pertanian, perdagangan, dan industri;
5. islamisasi pemerintahan;
6. kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum (fiqh) dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan;
7. pendidikan, kesenian, arsitektur meliputi pendidikan dasar (*kuttab*), menengah, dan perguruan tinggi; perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek.⁸

Rincian berbagai kemajuan tersebut dapat dilihat dari tulisan Philip K. Hitti,⁹ sebagai berikut.

a. *Biro-biro Pemerintahan Abbasiyah*

Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas (*diwan az-zimani*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi; dewan korespondensi atau kantor arsip (*diwan at-tawqi*) yang menangani surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah; dewan penyelidik keluhan; departemen kepolisian dan pos. Dewan penyelidik keluhan (*diwan an-nazhar fi al-mazhalini*) adalah sejenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada departemen administratif dan politik. Cikal bakal dewan ini dapat dilacak pada masa dinasti Umayyah karena Al-Mawardi meriwayatkan bahwa Abd Al-Malik adalah khalifah pertama yang menyediakan satu hari khusus untuk mendengar secara

8 Dirangkum dari Philip K. Hitti, hlm. 332-416.

9 Dimodifikasi dari Philip K. Hitti, dari halaman 332-416.



Perkembangan Pemikiran Ekonomi Para Fuqaha pada Masa Bani Abbasiyah dan Masa Modern

Bab 6

A. Terminologi Pemikiran Ekonomi Islam

Terminologi pemikiran ekonomi Islam pada pembahasan ini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam kenyataannya, kedua pengertian ini sering menjadi kesatuan sebab para sarjana muslim memang menggali pemikirannya dengan mendasarkan pada ajaran Islam. Pemikiran ekonomi dalam Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariat Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak ada Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. abad ke-7 Masehi. Pemikiran-pemikiran para sarjana muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Memang, harus diakui secara jujur bahwa para sarjana muslim pasca-Rasulullah SAW. banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya Syrian-Alexandrian, Zoroastrian, dan India. Akan tetapi, mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir-pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya, dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam (Nakosten, Mehdi, 1994).



Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran, Sunnah, ijtihad (pemikiran), dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis. Dengan demikian, tulisan ini hanya fokus pada kajian historis, yakni bagaimana usaha manusia dalam menginterpretasi dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang dahulu mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi serta menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masanya. Jadi, cakupan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tulisan ini ialah mengkaji cara pemikiran para ilmuwan Islam sepanjang sejarah membahas sejarah ekonomi Islam yang terjadi secara aktual.

B. Fase-fase Pemikiran Ekonomi Islam

Ahmad Khurshid (1985: 9-11) dan Deliarnov Anwar (2008) dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi empat fase berikut.

Fase pertama, pada pertengahan 1930-an banyak muncul analisis-analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariat Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara Barat. Meskipun kebanyakan analisis ini berasal dari para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal bidang ekonomi, langkah mereka telah membuka kesadaran baru tentang perlunya perhatian yang serius terhadap masalah sosial ekonomi. Berbeda dengan para modernis dan apologis yang umum berupaya untuk menginterpretasikan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga sesuai dengan praktik ekonomi modern, para ulama ini secara berani justru menegaskan kembali posisi Islam sebagai *comprehensive way of life*,

dan mendorong untuk suatu perombakan tatanan ekonomi dunia yang ada menuju tatanan yang lebih Islami. Meskipun masih banyak membahas hal-hal elementer dan dalam lingkup yang terbatas, pemikiran-pemikiran ini telah menandai sebuah kebangkitan pemikiran Islam modern.

Fase kedua, pada sekitar tahun 1970-an, banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Mereka mengetengahkan pembahasan tentang bunga dan riba dan mulai menawarkan alternatif pengganti bunga. Kerangka kerja suatu perbankan yang bebas bunga mendapat bahasan yang komprehensif. Berbagai pertemuan internasional untuk pembahasan ekonomi Islam diselenggarakan untuk mempercepat akselerasi pengembangan dan memperdalam cakupan bahasan ekonomi Islam. Konferensi internasional pertama diadakan di Mekah, Saudi Arabia pada tahun 1976, disusul Konferensi Internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional Baru di London, Inggris pada tahun 1977, dua seminar Ilmu Ekonomi Fiskal dan Moneter Islam di Mekah (1978) dan di Islamabad, Pakistan (1981), Konferensi tentang Perbankan Islam dan Strategi Kerjasama Ekonomi di Badan-badan Jerman Barat (1982), serta Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad (1983). Pertemuan yang terakhir ini secara rutin tetap berlangsung (2001) dengan tuan rumah negara-negara Islam. Sejak itu banyak karya tulis yang dihasilkan dalam wujud makalah, jurnal ilmiah, hingga buku.

Fase ketiga, perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama satu setengah dekade terakhir menandai fase ketiga yang didalamnya banyak berisi upaya-upaya praktikal-operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta. Bank-bank tanpa bunga banyak didirikan, baik di negara-negara muslim maupun di negara-negara nonmuslim, misalnya di Eropa dan Amerika. Dengan berbagai kelemahan dan kekurangan atas konsep bank tanpa bunga yang digagas oleh para ekonom muslim –sehingga terus disempurnakan– langkah ini menunjukkan kekuatan real dan keniscayaan dari sebuah teori keuangan tanpa bunga.

Fase keempat, pada saat ini, perkembangan ekonomi Islam menuju sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Adanya berbagai keguncangan dalam sistem ekonomi

konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, menjadi sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep yang terpenting adalah membangun sebuah kerangka ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik dari aspek mikro maupun makro ekonomi. Berbagai metode ilmiah yang baku banyak diaplikasikan di sini. Dari sisi praktikal adalah mengusahakan agar kinerja lembaga ekonomi yang telah ada (misalnya bank tanpa bunga) dapat berjalan baik dengan menunjukkan segala keunggulannya, serta perlunya upaya yang berkesinambungan untuk mengaplikasikan teori ekonomi Islam. Hal-hal inilah yang banyak menjadi perhatian dari para ekonom muslim saat ini.

C.

Para Pemikir Ekonomi Islam

1. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)

a. Biografi

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriah (699 M). Ia hidup pada dua masa, yaitu masa kekhalifahan bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa bani Abbas, Khalifah Al-Manshur.¹ Dia digelari Abu Hanifah (suci, lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Atjep Dzijazuli² menjelaskan "nama Abu Hanifah diambil dari ayat *Fattabi'û millata ibrâhîma Hanîfâ* (maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), (Q.S. *Âli 'Imrân* ayat 95)." Mazhab fiqhnya dinamakan mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a. karena suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang

1 Muhammad Hadhari, *Tarikh Al-Fiqh Al-Islâmi*, Beirut: Maktabah Al-Kuliah Al-Wujriyah, t.t., hlm. 229-30; lihat juga Abdurrahman Asy-Syarqawi, *A'immatu Al-Fiqh At-Tis'ah*, (Terj. Mujiyo Nurkholis), Bandung: Al-Bayan, 1994, hlm. 42.

2 Atjep Dzijazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Orba Sakti, 1991, hlm. 108.

utama pada zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.³

Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum dilahirkan, ayahnya pindah ke Kufah. Ia dinamai An-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan.⁴ Pada masa Abu Hanifah dilahirkan, pemerintah Islam (di Kufah) berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (khalifah dari bani Umayyah yang kelima).⁵ Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah.⁶

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak seorang saudagar kaya, ia menjauhi hidup bermewah mewah. Setelah menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri, misalnya memberi kebutuhan makan dan menguatkan pasukan Imam Zaid ketika memberontak khalifah bani Umayyah.⁷

Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu (sampai sekarang, penulis), dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah—seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta supaya Abu Hanifah menjadi Qadhi.⁸ Sayangnya, Abu Hanifah menolak. Karena menolak tawaran tersebut, Abu Hanifah ditangkap, dipenjarakan, dan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk, Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Ia tinggal di sana selama 6 (enam) tahun (130-136 H). Setelah Umayyah berakhir, ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira.⁹

3 www.fikar.org/2006/02/11/biografi-mazahibul-arbaah/

4 Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 34.

5 Moenawar Cholil, *Empat Biografi Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 19.

6 Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam*, Mesir: Maktabah An-Nahdlah Al-Mishriyyah, Jilid II, 1974, hlm. 177; lihat pula Abu Zahrah, *Muadharah fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah*, Maktabah Al-Madani, t.t., hlm. 166.

7 Abdurrahman Asy-Syarqawi, *op.cit.*, hlm. 44.

8 Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 82.

9 *Ibid.*, hlm. 202.



Jejak Rekam Pemikiran Ekonomi pada Masa Khilafah Kerajaan Usmani

Bab 7

A. Pendahuluan

Nama kerajaan Turki Usmani diambil dan dibangskan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Usmani Ibnu Sauji Ibnu Orthogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kia Alp, kepala kabilah Kab di Asia Tengah (Hamka, 1987: 205). Turki Usmani ini berkuasa dari abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Usmani adalah Usman dengan gelar Padisya Alu Usman atau Raja dari keluarga Usman (Syafiq A. Mugni, 1996: 53).

Setelah Ertoghrul meninggal dunia tahun 1289 M, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Usman. Putra Ertoghrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Usmani (Badri Yatim, 1997: 130). Wilayah kekuasaan Usman cukup luas yang meliputi Semenanjung Balkan, Asia kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara (Safiq A. Mugni, 1996: 91). Turki Usmani berkuasa sekitar 7 abad dengan 37 sultan.

1. *Kondisi Politik dan Sosial Turki Usmani pada Abad ke-17*

Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan Turki Usmani pada abad ke-17 banyak mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki Usmani. Berakhirnya ekspansi kerajaan Turki Usmani, lembaga-lembaga pemerintahan



sering kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer. Perseteruan antara pemerintahan pusat dan elite lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari rakyat muncul ke permukaan dan kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat kepada kelompok Janissari, ulama dan keluarga Usmani yang telah mapan dalam pemerintahan pusat (Syafiq A. Mugni, 1996: 91).

Munculnya kemunduran Turki diawali dari kekacauan pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad III, pengganti Murod III. Situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Australia sehingga mampu memukul mundur kerajaan Usmani (Badri Yatim, 1997: 164). Keadaan ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Ibrahim (1640-1648) dan puncak kehancuran pemerintah Turki Usmani pada abad ke-17 terjadi pada masa Mustofa (1617-1618 M).

Pada masa Sultan Ahmad I, Persia mengadakan perlawanan terhadap Turki Usmani, dan pada tahun 1612 M, ditandatangani suatu perjanjian damai yang sangat menguntungkan Persia. Pada tahun 1616 M, ketika bangsa Turki datang lagi dengan tentara yang kuat dan mengepung Erivan, bangsa Persia melawan dan memukul mundur para penyerang (Syed Mahmudunnasir, t.t.: 420).

Melihat kenyataan itu, para negarawan Turki mulai memikirkan langkah-langkah perbaikan dalam segala bidang demi kestabilan dan kekuatan kerajaan. Langkah-langkah perbaikan kerajaan Turki Usmani mulai diusahakan oleh Sultan Murod IV dan memperoleh kemajuan. Akan tetapi, situasi politik yang sudah membaik itu kembali merosot pada masa pemerintahan Ibrahim (1640-1648), karena ia termasuk orang yang lemah (Badri Yatim, 1997: 164).

Pada masa ini orang-orang Venetia melakukan peperangan laut melawan Turki Usmani dan berhasil mengusir orang-orang Turki Usmani dari Cyprus dan Creta tahun 1645 M. Kekalahan itu membawa Muhammad Kopru pada kedudukan sebagai wazir atau Shadr Al-Azham (perdana menteri) yang diberi kekuasaan absolut (Hasan Ibrahim Hasan, 1989: 339). Ia berhasil mengembalikan peraturan dan mengonsolidasikan stabilitas keuangan negara (Badri Yatim, 1997: 165).

Setelah Kopru meninggal dunia (1661 M), jabatannya dipegang oleh anaknya, Ibrahim, yang menduga bahwa kekuatan militernya sudah kuat kembali, karena itu ia menyerbu Hongaria dan mengancam Viena, tetapi perhitungan Ibrahim meleset. Ia kalah dalam pertempuran itu secara berturut-turut.

Pada tahun 1683, Turki Usmani mengadakan penyerangan ke Benteng Wina, tetapi mereka mengalami kegagalan. Hal ini semakin meyakinkan bangsa Barat dan Eropa bahwa Turki Usmani telah lemah. Untuk itu, mereka mengadakan banyak serangan ke wilayah kekuasaan Turki Usmani (L. Stodard, 1996: 26).

Sejak Sultan Turki gagal dalam merebut kota Wina pada tahun 1683, peranan kerajaan Osmaniah di medan peperangan berubah. Sejak tahun 1683, tentara Turki kebanyakan hanya berusaha menangkis pukulan-pukulan musuh dan tidak berdaya lagi untuk melancarkan serangan-serangan (Philip K. Hitti, t.t.: 240).

Pada masa selanjutnya, wilayah Turki Usmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara-negara Eropa yang baru mulai bangun (Badri Yatim, 1997: 165). Pada tahun 1699 M terjadi perjanjian Karlowith yang memaksa Sultan untuk menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia dan Croasia kepada Hapsburg; dan Heminietz, Pedolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmetia kepada orang-orang Penetia (Hasan Ibrahim Hasan, 1989: 340).

2. *Kondisi Sosial dan Perekonomian Turki Usmani pada Abad ke-17*

Ketidakstabilan politik kerajaan Turki Usmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya perang (Yatim, 1997: 168).

Pada abad ini, jumlah penduduk Turki semakin banyak, sementara pada saat yang sama, kerajaan menghadapi problem intern sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional, yang lebih maju jika dibandingkan dengan negara Turki Usmani (Syafiq A. Mugni, 1996: 104).

Di Eropa pada waktu itu telah muncul kapitalisme. Sebagai akibat dari munculnya kapitalisme bangsa Eropa dan dominasi mereka di bidang perdagangan adalah terus menurunnya produksi industri kerajinan masyarakat Turki. Ekspansi bangsa Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka, telah memunculkan sejumlah industri baru di sektor industri logam dan tekstil. Industri baru itu telah memaksa mereka untuk mencari secara terus-menerus pasar baru bagi ekspor produksi mereka. Para pengusaha kapitalis mengembangkan pasar dan industri mereka dengan menciptakan teknik dan kebutuhan baru dalam upaya bersaing dengan industri tradisional masyarakat Turki. Para pedagang Eropa membeli bahan mentah dari Turki, kemudian mereka mengolahnya di Eropa. Setelah itu, dibawa dan dipasarkan di Turki dengan diskon tinggi dan kualitas lebih bagus. Dengan cara ini, sektor industri kerajinan Turki banyak yang gulung tikar.

Selanjutnya, nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang asing juga turun drastis meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan harga, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Harga makanan ikut merangkak naik secara bertahap dan konsekuensinya memengaruhi jumlah pendapatan dan gaji para pegawai kerajaan. Situasi perekonomian yang serba sulit ini memaksa kerajaan untuk mengevaluasi nilai mata uangnya kembali sehingga mengakibatkan dislokasi baru dan krisis keuangan berkelanjutan hingga perkembangan sejarah kerajaan Turki pada masa berikutnya (Syafiq A. Mugni, 1996: 107).

3. Kondisi Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kerajaan Turki Usmani pada Abad ke-17

Walaupun di bidang politik dan ekonomi, Turki Usmani banyak mengalami kemunduran, pada abad ke-17 ini, kerajaan Turki Usmani mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan seni. Dalam bidang syair, muncul Nefi' dan Syekh Al-Islam Zekeria Zade Yahyat Efend. Adapun dalam bidang sastra prosa, muncul nama Katip Celebi dan Evia Celebi. Katip Celebi mengarang buku *Kasf Az-Zunun fi Asmaailkutub wal Funun*. Sementara Evia Celebi mengarang buku *Seyahatname* (Syafiq A. Mugni, 1997: 87-8). Pada abad ini juga karya populer yang berbentuk puisi dan cerita tumbuh subur.

Dalam kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Turki Usmani mengalami banyak kemandegan. Pada masa ini, filsafat, ilmu sejarah, astronomi, kedokteran, mekanik, dan lain-lain tidak berkembang, sementara di Eropa pada saat itu mengalami kemajuan.

Kerajaan Usmani kurang berhasil dalam iptek disebabkan mereka hanya mengutamakan kekuatan militer. Kekuatan militer tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju dan canggih (Badri Yatim, 1997: 168).

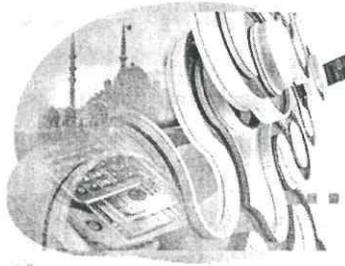
Kemandegan ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Usmani ada kaitannya dengan perkembangan metode berpikir yang kolot dan tradisional, di kalangan ulama yang cenderung menutup diri dari pengaruh kemajuan Eropa dan ini juga diakibatkan dengan menurunnya semangat berpikir bebas akibat pemahaman tasawuf.

Demikianlah keadaan iptek Turki Usmani, pada akhirnya Turki Usmani ini runtuh karena banyak diserang oleh Eropa yang didukung dengan kecanggihan yang terus-menerus berkembang di tengah-tengah mereka.

Karakteristik dunia Islam pada abad ke-17 tertumpu pada tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi di Persia, Mughal di India, dan Turki Usmani di Turki dengan dua periode. Kerajaan Safawi di Persia menjadikan aliran Syi'ah sebagai mazhab resmi kerajaan, dan semenjak itu sampai kini, Iran adalah pusatnya aliran Syi'ah. Kerajaan Usmani mengambil bentuk Sunni, dan pertentangan antara Sunni dan Syi'ah merupakan gangguan dalam politik internasional Islam yang dieksploitasi oleh Eropa yang pada masa itu mulai bangkit, untuk memperlemah serangan-serangan di Eropa Timur. Adapun Kerajaan Mughal di India berusaha memperkecil pertentangan Sunni-Syi'ah.

Periode 1500-1700 M merupakan fase kemajuan dan merupakan kemajuan tiga kerajaan besar tersebut. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki dan ekspansi Islam ke Eropa Timur berjalan dengan lancar sehingga kota Mina beberapa kali terancam akan jatuh pada tahun 1529 M dan 1530 M.

Masing-masing dari ketiga kerajaan ini mempunyai masa kejayaan sendiri terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah masih dapat dilihat di Istanbul, Turki, Hibiris, Asphan, dan kota-kota lain di Iran dan New Delhi di India. Perhatian para ilmu pengetahuan



Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islami dengan Pemikiran Ekonomi Konvensional

Bab 8

A. Pendahuluan

Secara komparatif dan analitis, kita harus menempatkan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya secara proporsional dan *fair*. Dalam hal ini, penulis membandingkan antara sistem sosialisme, kapitalis, *welfare state*, marxisme, dan Islam. Sebuah perbandingan intersistemik –meminjam istilah Haiderr Naqvi¹ meskipun membuat perbandingan intersistemik tidak sama dengan mengidentifikasi ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi tersebut. Ini karena kesan-kesan dangkal yang muncul berdasarkan ketidaksamaan yang terpisah di antara sistem-sistem ekonomi akan segera hilang dengan mengutip kesamaan-kesamaan intersistem yang lebih positif. Oleh karena itu, dibutuhkan kriteria objektif untuk mengevaluasi beragam sistem ekonomi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Islam. Pendekatan aksiomatik yang ditawarkan dalam buku ini menyediakan seperangkat kriteria objektif tersebut dan uraian secara mendasar sistem-sistem tersebut.

B. Islam dan Kapitalisme

1. Esensi Perbandingan

Dapatkah Islam disamakan dengan kapitalisme dan bukan sosialisme?

1 Syed Nawab Haiderr Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 103.

Satu hal yang jelas dari kesamaan antara ilmu ekonomi Islam dan kapitalisme adalah bahwa keduanya menolak sosialisme. Kemudian, terdapat beberapa kesamaan yang muncul antara dua sistem tersebut berhubungan dengan sikap-sikapnya yang sangat mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi serta sejumlah kesamaan dalam memandang peran inisiatif pribadi dalam meningkatkan pertumbuhan. Juga, Islam sebagaimana kapitalisme menekankan akumulasi dalam bentuk komoditas yang bisa dipertukarkan (dari nilai-gunanya) sebagai bagian dan bidang dari dinamika kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya mengecam feodalisme sebagai anti kemajuan dan setuju dengan struktur sosial yang bisa berubah-ubah.²

Perbedaan-perbedaan di antara kedua sistem tersebut muncul dari sumber umum, yaitu pandangan etika dari kedua sistem tersebut. Jika para pendukung kapitalisme yang terkenal terus bersikukuh pada kebebasan moral perilaku mementingkan diri sendiri (yang eksklusif), baik dalam teori maupun praktik, ekonomi Islam tidak akan menerima kedaulatan yang tak dapat diganggu-gugat dari perilaku mementingkan diri sendiri dalam dunia ekonomi –meskipun pentingnya perilaku demikian sebagai suatu kekuatan motivasional di balik inisiatif pribadi, diakui. Dengan demikian, bertentangan dengan konsep kepemilikan kapitalisme yang berhubungan dengan kepemilikan kekayaan pribadi, Islam menekankan sikap lebih banyak memberi. Perlu dicatat bahwa penerimaan terhadap pandangan ini tidak berarti membatasi kemutlakan hak individu terhadap kepemilikan pribadi jika ketentuan-ketentuan hukum tertentu telah dipenuhi. Hal itu lebih menunjukkan sikap etik Islam, yang menurut sikap etik tersebut, semua kekayaan milik Allah, Dzat yang menghendaki bahwa kekayaan seharusnya dimiliki “bersama” oleh semua manusia.

Adapun kapitalisme bisa merupakan baik (i) model produksi kapitalis ataupun (ii) *frame-work* sosio-ekonomi kapitalis (Rodinson, 1978). Dua aspek ini dapat saling terkait, tetapi juga dapat dipisahkan. Sekarang, jika model produksi kapitalis adalah model yang secara vertikal mengintegrasikan proses-proses produksi dari tingkat dasar sampai tingkat produk akhir, ini merupakan proses yang penting dari industrialisasi dalam ekonomi Islam. Sejauh *frame-*

2 *Ibid.*, hlm 103.



work sosio-ekonomi kapitalis menggambarkan konsumen-konsumen (pribadi) dan produsen (pribadi) sebagaimana yang dihubungkan bersama-sama melalui pasar, ini juga harus merupakan gambaran ekonomi Islam. Hal ini karena Islam memberikan kepercayaan yang besar pada inisiatif pribadi, bahkan meskipun pemerintah akan mengintervensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, ada satu aspek lain dari kapitalisme sebagai sebuah *framework* sosio-ekonomi yang perlu dicatat. Kapitalisme bukan sekadar suatu sistem ekonomi, tetapi sebagai suatu setting kultural yang lebih luas, di dalamnya tindakan mengejar kekayaan melayani tujuan yang tidak disadari, yang sama, sebagaimana kebanggaan militer (Heilbroner, 1987). Lebih dari itu, sistem kapitalis juga memiliki sistem etika pada dirinya sendiri. Menurut Viner (1978), etika Protestan merupakan kekuatan pendorong kapitalisme: ...pencarian kekayaan tak terbatas dan penuh pengabdian melalui kegiatan industri terus-menerus, pengendalian yang ketat terhadap pengeluaran untuk konsumsi ataupun untuk sedekah, konsentrasi waktu dan perhatian dalam mengejar urusan-urusan bisnis seseorang, menghindari hambatan melalui persahabatan yang akrab dengan orang lain, eksploitasi terhadap buruh secara sistematis dan tanpa belas kasih serta pengawasan kejujuran yang ketat dalam hubungan seseorang dengan orang lain di dalam batas-batas yang diatur dalam "legalitas formal". Kekayaan kaum kapitalis dengan cepat menumpuk, sementara gaji-gaji yang eksploitatif dan kondisi buruk yang memprihatinkan berlangsung pada masa jayanya kapitalisme –suatu proses yang secara jelas menggambarkan preskripsi Marxis yang laba dan tingkat laba yang kompetitif ditentukan oleh nilai-tambah, yang dalam ukuran sebaliknya, eksploitasi sosial yang luas terjadi dalam sistem kapitalis.

Selain masalah-masalah implementasi, pada prinsipnya Islam berusaha mengurangi eksploitasi buruh dengan mengusahakan suatu distribusi pendapatan yang *fair*. Islam juga tidak memandang pemupukan kekayaan oleh segelintir kaum kapitalis sebagai suatu kebajikan absolut tanpa memerhatikan konsekuensi-konsekuensi sosialnya. Untuk mengetahui perbedaan intersistemik ini, secara lebih jelas, hal-hal berikut perlu dicatat.

Pertama, dari sudut pandang Islam, penekanan yang berlebihan oleh kapitalisme terhadap nilai-nilai material merusak keseimbangan yang tipis

antara perilaku ekonomi dan etik. Memang, di bawah kapitalisme perilaku memaksimalkan *self-interest* secara individual menggantikan sistem nilai apa pun yang berharga, khususnya yang didasarkan pada agama. Sebaliknya, dalam Islam, desakan menimbun kekayaan dikurangi berdasarkan nilai-nilai manusia dan dalam suatu visi yang menitikberatkan pada nilai-nilai moral:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا .
الكهف : ٤٦

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S. Al-Kahf [18]: 46)

Kedua, berlawanan dengan sanksi (moral) kapitalisme terhadap tindakan menimbun kekayaan tanpa pembatasan yang jelas, Islam dengan jelas mengakui bahwa sebagian dari kekayaan seseorang adalah milik orang miskin, dan mereka (orang-orang miskin) kehilangan sebagian harta tersebut karena proses organisasi produksi masyarakat. Dalam hal ini, Islam memerintahkan tindakan perbaikan sehingga orang miskin bisa mendapatkan haknya. Perlu dicatat bahwa Islam mengakui perbedaan kapasitas pendapatan bermacam-macam orang, sejauh hal ini bersumber dari perbedaan kontribusi kerja dan kapasitas intelektual, tetapi Islam membatasi pembelanjaan kekayaan dan juga, “surplus” pendapatan yang berasal dari produksi barang-barang yang secara sosial *non-profitable*.

Ketiga, kapitalisme berpegang teguh pada kebebasan ekonomi individu; dan elemen penting dari kebebasan ini adalah hak individu atas kekayaan pribadi dan khususnya haknya untuk menahannya dari penggunaan masyarakat jika mereka menginginkan (Heilbroner, 1987).

Sementara hak-hak kapitalistik ini –mungkin merupakan keharusan bagi kebebasan individu dan kemajuan sosial, adalah tidak tepat. Berdasarkan hal



ini, kapitalisme memadai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara sistem ekonomi alternatif juga dapat melakukan hal yang sama. Dalam masyarakat Islam, kebebasan individu berasal dari prinsip Kehendak Bebas –yang ditegakkan berdasarkan keyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah, dan bahwa manusia dipercaya Allah untuk menguasainya. Selanjutnya, Islam tidak memperluas dukungan total terhadap institusi kepemilikan pribadi sebagai masalah hak (prosedural) yang absolut bagi pemilik individual karena filsafat ekonomi dan sosialnya yang peka-dampak —khususnya, berkaitan dengan pengaruh pelaksanaan hak-hak kepemilikan pribadi terhadap kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat, yang baginya klaim kesejahteraan masyarakat berawal dalam seluruh keadaan ekonomi.

Keempat, kapitalisme juga memaksakan rasa tanggung jawab sosial pada individu melalui kebijakan-kebijakan seperti pajak pendapatan progresif dan “pajak kematian”, konsep tanggung jawab sosial tidak menonjol sebagaimana dalam ekonomi Islam. Jika dalam kapitalisme, orang miskin tidak memiliki hak atas kekayaan orang kaya, Islam memiliki teori yang jelas tentang kewajiban-kewajiban sosial individu, bahwa individu diharuskan mengeluarkan sebagian dari kekayaannya sebagai hak masyarakat, yang kaya dilarang menghambur-hamburkan kekayaan karena yang demikian itu merupakan – “saudara setan.” Ini semua khas Islam dan menjadikannya berbeda dengan kapitalisme (sebagaimana juga dengan sosialisme).

2. Perbedaan Dasar Keduanya: Kelemahan dan Kebaikan

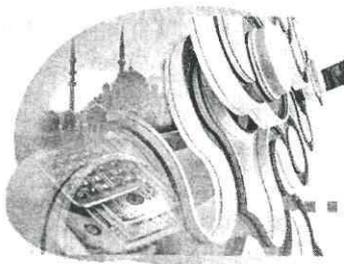
a. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis

(1) Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.

(2) Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi, dan mengelola



Daftar

Pustaka

- Abdul Qadir Alaydrus Ba'lawi. *Ta'rif Al-Ihya fi Fadha'il Al-Ihya*. Jakarta: Daru Ihya'I Al-Kutub Al-'Arabiyah. t.t.
- Abdurrahim Al-Asnawi. *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*. Juz II. Beirut: Dari Al-Kutub Al'Ilmiyyah. 1987.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi. *A'immatu Al-Fiqh At-Tis'ah*. Terj. Mujiyo Nurkholis. Bandung: Al-Bayan. 1994.
- Abi Al-Wahid An-Najjar. *Al-Khulafâ Ar-Râsyidin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyat. 1990.
- Abu Al-Afjan. *Min Atsar Fuqaha Al-Andalus*. Tunis: Mathbaah Al-Kawakib. 1985.
- Abul Quasem, M. *Etika Al-Ghazali*. Terj. J. Mahyudin. Bandung: Pustaka. 1988.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Jakarta: Taberi. 1995.
- _____. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Jakarta: Taberi. 1995.
- _____. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid III. Jakarta: Taberi. 1995.
- A. Syalabi. *Tarikh Al-Islamiy wa Al-Hadarah Al-Islamiyyat*. Terjemahan

- Mukhtar Yahya. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1994.
- Ahmad Al-Hashari. *Tarikh Al-Fiqh Al-Islâmi*. Beirut: Maktabah Al-Kuliyah Al-Wujriyah. t.t.
- Ahmad Amin. *Dhuha Al-Islam*. Jilid II. Mesir: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah. 1974.
- . *Fajr Al-Islam*. Kairo: Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah. 1975.
- Abu Zahroh. *Muhadharah fi Tarikh Al-Madzahib Al-fiqhiyyah*. Maktabah Al-Madani. t.t.
- Ahmad Badawi Thabanah. “Muqadimmah Al-Ghazali wa Ihya’ ‘Ulum Ad-Din” dalam *Ihya’ ‘Ulum Ad-Din*. Juz I. Jakarta: Maktabah Daru Ihya’i Al-Kutub Al-‘Arabiyyah. t.t.
- Ahmad Daudy. *Kuliah Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Ahmadie Thaha. “Kata Pengantar” dalam terjemahan *At-Tibru Al-Masbukfi Nasihat Al-Muluk*. Bandung: Mizan. 1994.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-Din*. Jilid 4. t.t.
- Ali Mufrodi. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Amir Nuruddin. *Ijihad Umar ibn Al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.
- Arief Hoetoro. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Yogyakarta: Bayumedia. 2008.
- Atjep Djazuli. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Orba Sakti. 1991.
- Ali Mufrodi. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Anil Bhatti. “*Iqbal and Goethe*” (PDF). Yearbook of the Goethe Society of India. 2006.
- A. Hanafi. *Ikhtisar Sejarah Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1981.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*. Juz I. Riyad: Muktabah Ar-Riyad Al-Haditsah.

- Avanasyef. *Marxist Philosophy*. Second Revised Edition. Translated from Russian by Leo Lempert. Moskow: Progress Publisher. 1065.
- Aron. *The Opium of Intelektual. The Article*. 1959.
- Bertold Spuler. *History of the Mongols: Based on Eastern and Western Accounts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries*. London: Routledge & Kegan Paul. 1968.
- Bojena Gajane Stryzewska. *Tarikh Al-Islamiyah*. Beirut: Al-Maktabah At-Tijari. t.t.
- Charles J. Adams. "Islam" dalam *A Reader's Guide to the Great Religions* Editor: Charles J. Adams. New York: The Free Press. 1977.
- Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III. Jakarta: Depag. 1993.
- Dewan Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1993.
- Gustav Lebon. *Hadhdhat al'-Arab*. Kairo: Mathba'ah 'Isa Al-Babi Al Halabi. t.t.
- H. Lammens. S.J. *Islam: Beliefs and Institutions*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation. 1979.
- Hasan Ibrahim Hasan. *Islamic and History Culture*. Terjemah D. Humam. Cet. I. Yogyakarta: Kota Kembang. 1989.
- Hasbi Ash-Shiddieqi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- Hudhari Bik. *Tarikh At-Tasyri' Al-Islâmi*. Beirut: Al-Maktabah At-Tijâriyah Al-Kubra-Dar Al-Fikr. Cetakan kedelapan. 1968.
- Ibnu Hisyam. *Ash- Sirah An-Nabawiyah*. Mesir: Musthata Al-Babi Al-Halabi. 1955.
- Ira M. Lapidus. *History of Islamic Societies*. Terj. Ghufron Amas'adi. Jakarta: Raja Grapindo Persada. t.t.
- Jaih Mubarak. "Transmisi Nepotisme: Perspektif Sejarah Umat Islam" dalam *Forum Studi*. Vol 23 No. 2. Juli-Oktober 1999.



- John L. Esposito dan John O. Vol. *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan. 1995.
- Juhaya S. Praja. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Bandung: Yayasan Piara. 1997.
- Karl Marx. *Economic Studies from Marx's Notebooks*.
 ————. *The Communist Manifesto*. New York: The Modern Library. 1954.
- M. Rida. *Abu Bakar Ash-Shiddiq Awwal Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Beirut: Dar Al-Fikr 1983.
- Maurice Cornforth. *Matrealisme and The Dialectical Method*. New York: International Publishers. 1951.
- M. Lutfi Jum'ah. *Tarikh Falasifah Al-Islam*. Mesir: Dar Al-Maktab. 1927.
- Michael H. Hart. *The 100 a Ranking of the Most Injhtüücu Persons in History*.
 Terjemahan Mahbub Junaidi. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1986.
- Moenawar Cholil. *Empat Biografi Imam Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Jakarta: Zahr. 2008.
- Muhammad Yasir Nasution. *Manusia menurut Al-Ghazali*. Jakarta: Rajawali Pers. 1988.
- Muhammad Al-Khudhari. *Itman Al-Wafa fi Sirah Al-Khulafa*. Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra. 1964.
- Mushthafa Az-Zayd. *Al-Mashlahah fi Tasyri Al-Islamy wa Najmud Ath-Thufi*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1964.
- Nur A. Fadhil Lubis. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana. 1995.
- Nurcholish Madjid. *Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar*

- ibn Al-Khattab* dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. t.t.
- Oliver Leman. "Ibnu Miskawaih" dalam *Eksiklopedi Tematis Filsafat Islam*. Editor: Seyyed Hosen Nasser. Bandung: Mizan. t.t.
- Philip K Hitti. *History of The Arabs*. Edisi ke-10. New York: Corlear Bay Club. 1970.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII. 2007.
- Robert Downs. *Book That Changed The World*. Chicago: American Library Assosiation. 1956.
- S. Khuda Bakhsh. *Politik Islam*. Delhi: Idarah Al-Adabiy. t.t.
- Simuh. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 1997.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasati Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Press. 1994.
- Siti Maryam, dkk. (ed). *Sejarah Peradaban Islam dari Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI. 2003.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Syeh Mahmudunnasir. *Islam Its Concepts and History*. India: Lohoti Fine Art Press. 1981.
- Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam (Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam)*. Terj. Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- W. Montgomery Watt. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1990.
- Zainal Abidin Ahmad. *Riwayat Hidup Al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Sumber-sumber dari Internet

<http://demimasa2.tripod.com/tokoh3>;

<http://demimasa2.tripod.com/tokoh3>;

<http://google.com>

<http://suara-muhammadiyah.com/2009/?p=595>

<http://sudarti.staff.umm.ac.id/files/2010/01/moneter.ppt>

<http://taufik-siraj.blogspot.com/2010/02/arab-pra-islam.html>

<http://taufik-siraj.blogspot.com/2010/02/arab-pra-islam.html>

<http://www.acehforum.or.id/ibnu-chaldun-bapak-t11987.html>

<http://www.dakwatuna.com/2007/urgensi-mengkaji-sirah-nabawiyah/>

<http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg29053.html>

Agustianto, “*Meracik Pemikiran Ekonomi Islam*” diakses dari <http://agustianto.niriah.com/2008/04/28>

Firdaus Muhammad; <http://www.dukonbesar.com>

www.fikar.org/2006/02/11/biografi-mazahibul-arbaah/

www.mohkhoiruddin.com www.Wikipedia.com

Sir Muhammad Iqbal’s 1930 Presidential Address” (*HTML*).

Speeches, Writings, and Statements of Iqbal. 2006-12-19.

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Iqbal

